Penelitian

- Pengaruh Atribut Terhadap Peningkatan Penjualan Motor Pada PT.Menara Agung Padang
- Analisis Pelaksanaan Manajemen Aset Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Perkoperasian
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Pembangunan Emergency Exit Di Perkantoran
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia
- Gambaran Faktor Resiko Kejadian Kanker Serviks Di Poliklinik Kebidanan RSUP Dr. M. Djamil Padang
- Hubungan Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas Seberang Padang
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
- Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Beban Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Dengan Perilaku Kekerasan Di Unit Pelayanan Jiwa A RS Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang Tahun 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Penelitian	
Pengaruh Atribut Terhadap Peningkatan Penjualan Motor Pada PT. Menara Agung Padang Abdy Kurniawan Chairul	1 - 5
Analisis Pelaksanaan Manajemen Aset Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Perkoperasian Fina Afriany	7 - 16
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Pembangunan Emergency Exit Di Perkantoran Hasdani	17 - 24
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Irfan Ardiansyah	25 - 34
Gambaran Faktor Resiko Kejadian Kanker Serviks Di Poliklinik Kebidanan RSUP Dr. M. Djamil Padang Reska Handayani	35 - 45
Hubungan Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas Seberang Padang Rika Syafitri	47 - 59
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tuti Kelana Sembiring	61 - 69
Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Beban Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Dengan Perilaku Kekerasan Di Unit Pelayanan Jiwa A RS Jiwa Prof. HB Sa'anin Padang Tahun 2014 Welly	71 - 79
Pedoman Penulisan Jurnal Erudisi	81

Jurnal **Erudisi** diterbitkan 3 kali dalam satu tahun, Jurnal ini dapat menjadi wahana tukar pandang dan informasi diantara para cendekiawan, peminat masalah sosial dan politik maupun para praktisi berupa hasil pemikiran maupun hasil penelitian menyangkut masalah sosial dan politik. Redaksi berhak melakukan editing tanpa mengubah substansi isi artikel sesuai dengan naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab penulis dan tidak dapat diartikan sebagai pencerminan pendapat penerbit.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Tuti Kelana Sembiring
Universitas Ekasakti Padang

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence of the influence of the quality of tax services, taxpayer awareness, tax penalties and taxpayer understanding of the tax compliance in paying taxes on land buildings, the kambang utara, lengayang subdistrict pesisir selatan regency. The data in used this research were obtained from questionnaires completed by the taxpayer. The population in this study are all taxpayer land and building located in the Kambang Utara Lengayang Subdistrict Pesisir Selatan Regency. This study used propotional sampling technique sampling method, using the formula slovin with the smples were obtained as many as 400. The result of this resarch revealed that simultaneous effect on the tax compliance in playing taxes on land and buildings. While partially, quality of tax services, taxpayer awareness, and taxpayer understanding of significant positive impact on the tax compliance in paying taxes on land and buildings, and tax penalties of significant negative impact on the tax compliance in paying taxes on land and building.

Keywords: quality of service tax, taxpayer awareness, tax penalties, taxpayer understanding and taxpayer compliance

I. Pendahuluan

Untuk mewujudkan pembangunan bangsa indonesia diperlukan sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai, yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan bangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan salah satu contoh penerimaan yang berasal dari sektor pajak, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 betujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya (Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2011).

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan Negara, dalam pos penerimaan aggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dukuatirkan menyebabkan pemeritahan mengalami kesulitan untuk membiayai semua pengeluaran Negara, pengeluaran Negara yang

dibiayai oleh pajak yakni perhubungan dan pembangunan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit dan lain-lain. Salah satu cara perubahan perpajakan di Indonesia adalah pengalihan pajak bumi dan bangunan yang sebelum pajak pusat menjadi pajak daerah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan Dan Humas, 2012).

Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang strategis semakin tampak setelah dikeluarkan UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi bangunan serta diadakanya penyuluhan-penyuluhan mengenai PBB akan tetapi penyuluhan tersebut hanya sebatas pada pelaksanaan perpajakan saja, sehingga masalah kesadaran untuk membayar pajak perlu diadakan pengkajian lebih lanjut.

Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga Negara, tetapi juga merupakan kewajiban setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan Negara melalui pembangunan. Berdasarkan kenyataan sekarang ini bahwa sebagian besar masyarakat kambang utara mata pencariannya adalah petani, pedagang dan perantau sehingga pendapatan masyarakat masih relative rendah, maka dana yang terhimpun dari peran serta masyarakat melalui pajak akan mengalami kendala yaitu pembayaran pajak yang tidak tepat waktu atau menunggak serta pelaksanaan pembangunan akan terlambat atau tidak lancar. Berdasarkan keterangan salah satu bapak kepala desa di kambang utara kecamatan lengayang bahwa pada tahun 2015 pembayaran pajak bumi bangunan di daerah kambang utara mengalami banyak kendala yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak tepat waktu ataupun terlambat, presentase wajib pajak yang menunggak kurang 20,74% dari jumlah wajib pajak yang membayar tepat pada waktunya, oleh karna itu masalah kesadaran dalam meningkatkan pendapatan yang berguna bagi pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak yang sangat mendukung bagi terlaksananya pembangunan di daerah kambang utara kecamatan lengayang kabupaten pesisir selatan adalah pajak bumi bangunan.

Pemerintah Daerah kecamatan Lengayang menargetkan pendapatan asli daerah dari wajib pajak, khususnya dari pajak bumi dan bangunan (PBB), lebih besar perolehan dari tahun-tahun lalu. Jadi tahun ini target penerimaan sektor PBB sebesar Rp.75.438.551.-. Untuk mencapai target penerimaan pajak bumi bangunan perlu adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya agar terjadinya peningkatan pendapatan asli daerahnya dalam sektor pajak. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan terbagi dalam dua bagian diantaranya, factor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan (Franklin, 2008) dan faktor kesadaran perpajakan (Suhardito, 1999). Sedangkan faktor eksternal faktor yang bersaal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak. Kondisi sistem administrasi pajak suatu Negara, pelayanan wajib

pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2010)

Didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 sistem perpajakan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mana telah diubah beberapa kali menyatakan bahwa sistem self assessment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang mana wajib pajak dipercayakan untuk menghitung pajak terutang, melaporkan pajak terutang dan membayar pajak terutang kepada pemungut pajak atau fiskus. Untuk mendukung pelaksanaan sistem self assessment, direktorat jendral pajak perlu memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya seperti yang diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak NO.SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. Menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang fiskus akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Pelayanan kepada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Menurut Mardiasmo (2011) yang menjadi subjek pajak dan PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah atau bangunan wajib mendaftarkan obyek pajaknya tersebut ke kantor pelayanan PBB. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang disebut surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP). SPOP tersebut dapat diperoleh secara Cuma-Cuma di setiap kantor pelayanan PBB. Setelah diisi dengan benar, jelas dan lengkap SPOP harus dikembalikan ke kantor pelayanan PBB selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima SPOP. Jika mpengembaliannya melewati waktu yang telah ditentukan, maka kepada wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pajak yang seharusnya dibayar.

II. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Metode Angket (Kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto, 2002:128) Konsep dalam penelitian ini meliputi konsep pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Konsep-konsep tersebut diukur dengan menggunakan pengukuran interval/skala interval yang memungkinkan

peneliti untuk memberikan skor untuk setiap jawaban responden. Sedangkan metode perskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 5 poin. Dalam penelitian ini menggunakan angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka yaitu responden mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam angket, angket terbuka ini mengungkap data tentang pendapatan dari wajib pajak. Data diambil dari besarnya pendapatan yang diperoleh responden dalam tiap bulan kemudian dimasukkan skor. Sedangkan angket tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan untuk mengungkap data tentang pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, penegakan hukum, dan kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek penelitian, mengadakan wawancara yang ditujukan kepada responden yang ditentukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara tunjuk.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer . Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Menurut Istijanto (2008) data primer adalah data yang dicari dan diolah secara langsung oleh peneliti dan belum dipublikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Bentuk data primer yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria pengujian. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner tertutup kepada wajib pajak. Kuesioner diberikan secara langsung kepada wajib pajak selaku responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga kuesioner harus diisi sendiri oleh responden yang bersangkutan.

Populasi dan Sampel

Tabel 1

Populasi Wajib Pajak Bumi Bangunan Per Daerah di Kambang Utara
Kecamatan Lengayang Tahun 2015

No	Daerah	Populasi Wajib Pajak
1.	Pasiah Laweh	298
2.	Kampung Akat	614
3.	Gantiang Kubang	297
4.	Lubuak Sarik	1.295
5.	Kampung Baru	490
6.	Padang Panjang I	639
7.	Padang Panjang II	583
8.	Kambang Harapan	868
Total		5.048

Pada penelitian ini penarikan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling method yang menjadi sampel seluruh wajib pajak orang pribadi pajak bumi dan bangunan yang berada di daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang.

Metode Analisis

1. Uji Validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Suatu item valid atau gugur diketahui dengan melakukan perbandingan antara nilai *correlated item-total correlation* dengan koefisien *r* tabel. Jika *r* hitung > *r* tabel berarti item valid. Sebaliknya jika *r* hitung < dari *r* tabel berarti item tidak valid (gugur).
2. Uji Reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,600 (Nunnally, 1967 dalam Ghazali 2006).
3. Statistik Deskriptif. Tujuan pengujian statistik deskriptif adalah memberikan gambaran umum mengenai beberapa variabel yang digunakan pada penelitian ini. Pengujian ini menghasilkan output berupa ukuran numerik yang lebih mudah dipahami pembaca.

Pengujian Asumsi Klasik

- a. Uji multikolinearitas. Menurut Ghazali (2011) pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen. Pada

penelitian ini pengujian multikolineritas dilakukan dengan mencari nilai toleran dan variance influence factor (VIF). Gejala multikolineritas tidak akan terjadi bila toleransi yang dihasilkan berada diatas 0,10 dan VIF berada dibawah atau sama dengan 10. Apabila nilai VIF melebihi angka 10 maka asumsi multikolineritas terpenuhi dan sebaliknya jika nilai VIF kecil dari 10 dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas.

- b. Pengujian Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011) segala heteroskedastisitas adalah sebuah pengujian yang digunakan untuk mengetahui variasi keragaman variance, didalam penelitian ini pengujian untuk melakukan heteroskedastisitas digunakan model grafik. Didalam model tersebut masing-masing variabel yang akan di ikutkan kedalam tahapan pengujian regresi tidak akan teridentifikasi gejala heteroskedastisitas bila sebaran variance masing-masing variabel tidak membentuk sebuah pola yang jelas atau menumpuk dalam posisi tertentu. Tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat dilaksanakan setelah seluruh variabel penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Kualitas Pelayanan pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel terlihat hasil pengujian untuk variabel Kualitas Pelayanan Pajak nilai Sig.0,011, sedangkan dalam pengujian menggunakan alpha sebesar 0,05 hal ini berarti nilai Sig. $0,011 < 0,05$ sehingga keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, Karena Kualitas pelayanan merupakan suatu ukuran yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat merasakan puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak pelayanan publik suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah tercantum dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas fiskus memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, maka wajib pajak akan senang dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menyatakan bahwa Sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian untuk Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai Sig. 0,046, sedangkan dalam pengujian menggunakan alpha sebesar 0,05 hal ini berarti nilai sig. $0,046 < 0,05$ sehingga

keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada Variabel Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi maka hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak mengerti akan fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Oleh sebab itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2011) tentang Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative diterima. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian untuk variabel Sanksi Denda nilai Sig. 0,000, sedangkan dalam pengujian menggunakan alpha sebesar 0,05 hal ini berarti nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan Sanksi Denda berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan Sanksi Denda yang tegas oleh fiskus terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan wajib pajak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, maka kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya semakin tinggi pula. Oleh sebab itu agar berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi oleh wajib pajak, maka terdapat sanksi yang tegas untuk para pelanggarnya, dari pernyataan diatas. Pelaksanaan sanksi denda sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan.

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian untuk variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak nilai Sig. 0,047, sedangkan dalam pengujian menggunakan alpha sebesar 0,05 hal ini berarti nilai Sig. $0,047 < 0,05$ sehingga keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang peraturan perpajakan sangatlah penting, karena dalam hal ini menerangkan bagaimana cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami atau tidak tahu tentang peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dan juga melalui sistem perpajakan yang mewajibkan wajib pajak melakukan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Diharapkan para wajib pajak mengetahui dan memahami akan hal tersebut dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan akan semakin tinggi. Berdasarkan keteranga diatas. Pemahaman wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan.

IV. Kesimpulan

1. Kualitas Pelayanan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan,
2. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pelaksanaan Sanksi Denda secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di di Daerah Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2013. Target dan Realisasi PBB Pesisir Selatan Tahun 2014 dan 2015.
- Doli, Dominicus dan Khoiru Rusydi. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Untuk Wajib Pajak Badan.
- Franklin, Bermana. 2008. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, administrasi perpajakan, kompensansi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di kecamatan padang barat. Skripsi fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Ghozali, imam 2011. Analisis Mutivariate dengan Pendekatan SPSS 19.0. BPFE, Yogyakarta.
- Hendriko. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubuk Kilangan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang. padang .
- Istijanto. 2008. Kumpulan Riset Sumber Daya Manusia. Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Kementrian Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan dan Humas. 2011. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kememtrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan Dan Humas. 2012. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Lestari, Puji. 2010 Analisis Tingkat Pemahaman terhadap pelaksanaan self assessment system. Media Keuangan Vol.11 No.17 Tahun 2010.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta:CV. Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus 4. Salemba Empat. Jakarta
- Riko, Thomas. 2006. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Perencanaan dan Penggelapan Pajak Pada KPP Padang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang
- Sapriadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayan Pajak, sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunandi Kecamatan Selupu Rejang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang. Padang.
- Skretariat Negeri Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian dan Industri. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian dan Industri. Undang-Undang Republik Indonesia no. 28 Tahun 2007 tantang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Suandy, Early. 2008. Hukum Pajak. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sholicha, Mu'minatus dan Istiqomah. 2005. Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB dikabupaten Gresik. Jurnal Logos. Vol 3 No. 1 Gresik.
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. 1999. Pengaruh Faktor-Faktor yang melekat pada diri Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Simposium Nasional Akuntansi 11, Malang.
- Suyatmin. 2004. Penagruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumui dan Bangunan.